

ABSTRAK

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Salah satu peran serta di bidang pemberantasan tindak pidana narkoba adalah keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang mengadakan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran kepolisian menangani tindak pidana narkoba di Poldasu tahun 2006. Permasalahan yang muncul yaitu bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba, kendala apa saja yang dijumpai dalam proses penyidikan kasus narkoba, bagaimana peran kepolisian dalam memberikan sanksi hukuman penyalahgunaan narkoba, dan berapa jumlah kasus narkoba di Poldasu tahun 2006 dan tanggapan kasusnya.

Proses penyidikan yang dilakukan kepolisian yaitu menerima laporan (pengaduan) dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan mengadakan pemberhentian penyidikan. Kendala kepolisian dalam proses penyidikan yaitu pada saat memeriksa barang bukti ke laboratorium forensik, hasil pemeriksaannya sangat lambat, pemanggilan saksi yang mengalami kesulitan karena alamatnya berpindah. Karena kejahatan penyalahgunaan narkoba dipandang sangat membahayakan bangsa dan negara, kepada pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat berupa pidana mati (atau penjara seumur hidup) dan pidana denda. Kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2006 di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun 2005. Tercatat kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 257 pada tahun 2005 menjadi 309 kasus pada tahun 2006. Banyaknya tersangka yang hanya dihukum 1-5 tahun terhadap kejahatan narkoba seharusnya mendapatkan hukuman yang berat, karena perbuatan yang dilakukan tersangka sangat membahayakan mental dan stabilitas masyarakat.

Aparat kepolisian sebagai ujung tombak negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba hendaknya tetap konsisten dalam setiap kasus narkoba. Untuk meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana narkoba, maka perlu dipikirkan untuk dibuatkan suatu kegiatan psikologis yang melibatkan ahli psikologi.